

Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Perhotelan dalam Menghadapi Implementasi MEA

Tiffany Fortunatan

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ma Chung
e-mail: 111210122@student.machung.ac.id*

Hallie Josias Sahertian

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ma Chung

Abstract

At the end of 2015, Indonesia along with other countries which is incorporated in ASEAN organization will implement the ASEAN Economic Society (AEC). One of the sectors that is included in the first stage of implementation is the tourism and hospitality sector. Data stated that the opportunity of AEC implementation for Indonesia can help fasten economic growth in a larger scale of market. But, there are also challenges need to be faced so that Indonesian labors can compete with the labors from other country. One of the important strategies is to adjust standardization and give certification of competence for all of tourism and hospitality labors in Indonesia.

Keywords: *AEC, tourism, certification of competence, human resource.*

PENDAHULUAN

Dalam waktu dekat ini, bangsa Indonesia dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara akan segera melaksanakan implementasi Masyarakat Ekonomi Asean atau yang biasa disingkat MEA. Pada saat pertemuan ASEAN bulan Januari pada tahun 2007 dilakukan di Cebu, Filipina (Bank Indonesia, 2008), para pemimpin ASEAN setuju untuk mempercepat suatu inisiatif ambisius untuk mengintegrasikan perekonomian mereka dan membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) menjadi pada akhir tahun 2015.

Dalam MEA, tujuan yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. MEA menetapkan 7 (jenis produk yang menjadi prioritas untuk dilakukan standarisasi pada tahap awal, yaitu: produk karet, obat tradisional, kosmetik, pariwisata, sayur dan buah segar, udang dan budidaya perikanan, serta Peternakan. Salah satu sektor yang masuk dalam implementasi tahap pertama adalah pariwisata yang erat kaitannya dengan sektor perhotelan. Artikel

ini akan mengkaji tentang kesiapan industri sektor perhotelan di Indonesia dalam menghadapi implementasi MEA.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Pada awalnya, isu tentang MEA pertama kali diangkat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur pada bulan Desember tahun 1997. Pada saat itu, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Secretariat, 1997). Selanjutnya, pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang awalnya direncanakan pada tahun 2020 menjadi akhir tahun 2015 dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.

Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan

kembali komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat proses pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di *ASEAN Vision 2020* dan *ASEAN Concord II*, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN (Rahayu, 2014). Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat pola integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, serta tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN.

Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Ini-tiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya. Bentuk kerjasamanya adalah: (1) pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; (2) pengakuan kualifikasi profesional; (3) konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan; (4) langkah-langkah pembiayaan perdagangan; (5) meningkatkan infrastruktur; (6) pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; (7) mengintegrasikan sektor industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah; dan, (8) meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk

membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu: (1) pasar dan basis produksi tunggal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif; (3) wilayah pembangunan ekonomi yang merata; dan, (4) daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

PERSIAPAN MEA

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melakukan beberapa persiapan untuk menyongsong era MEA di akhir tahun 2015 (BNSP, 2014), meliputi: kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi, sistem pendidikan berbasis kompetensi, sistem pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi (UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional), serta kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi secara sektoral. Menurut BNSP, Indonesia memiliki peluang yang besar dengan adanya MEA khususnya untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Peluang-peluang tersebut diantaranya adalah: terbukanya pasar kerja yang lebih luas, meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja global, pelatihan dengan sistem internasional, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di pasar kerja Internasional.

Walaupun peluang Indonesia cukup besar, namun hal itu tidak akan bisa dimanfaatkan kalau Indonesia tidak memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi MEA. Tantangan MEA bagi Indonesia menurut BNSP meliputi: standar kompetensi kerja, kualifikasi Nasional, dan terbatasnya lembaga pendidikan yang melakukan penerapan sistem pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Indonesia memerlukan tiga langkah strategi untuk menghadapi MEA. Ketiga langkah tersebut ialah identifikasi, *review*, dan harmonisasi standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional terhadap seluruh lembaga pengembangan SDM yang ada di Indonesia.

Saragih (2013) mengatakan bahwa kelemahan utama Indonesia terletak pada sinkronisasi program dan kebijakan antar peme-

rintah daerah dan pusat serta *mindset* masyarakat khususnya para pelaku usaha yang belum seluruhnya melihat peluang pengembangan perekonomian pada saat MEA 2015 mendatang. Dari segi jasa yang dimiliki Indonesia masih relatif lebih rendah kualitas tenaga kerjanya dibandingkan dengan tenaga kerja di negara ASEAN lainnya. Kualitas tenaga kerja yang rendah dapat mengakibatkan tenaga kerja Indonesia menjadi terancam. Perusahaan hampir dapat dipastikan akan memilih tenaga kerja yang berkualitas dan berani dibayar rendah seperti tenaga kerja dari negara-negara tetangga Indonesia.

Saragih (2013) menyatakan bahwa strategi yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di MEA 2015 nanti adalah upaya sinkronisasi program dan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, perbaikan kualitas tenaga kerja, perbaikan infrastruktur negara, meningkatkan jumlah pelaku usaha, mem-

fasilitasi kebutuhan serta sosialisasi MEA 2015, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat sektor industri jasa domestik, menstimulasi pelaku bidang jasa untuk melakukan *joint venture* dengan pelaku jasa negara-negara ASEAN, serta yang utama yaitu pemerintah perlu menyiapkan kebijakan resmi yang memuat strategi pemerintah untuk menghadapi MEA 2015.

FAKTA INDUSTRI PERHOTELAN DI INDONESIA

Ismainy (2014) mengungkapkan bahwa kawasan Asia Tenggara selama periode 2005-2012 mengalami pertumbuhan wisatawan mancanegara tertinggi di dunia yaitu sebesar 8,3 persen yang jauh diatas pertumbuhan global yaitu 3,6 persen. Pada 2013, pariwisata ASEAN tumbuh 12 persen atau mencapai 92,7 juta wisatawan yang juga diatas pertumbuhan global yaitu sebanyak 5 persen.

Tabel 1. Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya, Kamar dan Tempat Tidur di Jawa Barat Tahun 2011

Kabupaten/ Kota	Jumlah Hotel dan Akomodasi	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1. Bogor	150	6.395	12.087
2. Sukabumi	106	2.206	3.199
3. Cianjur	163	4.761	8.958
4. Bandung	33	854	1.205
5. Garut	114	1.656	2.500

Sumber: Majalah Sertifikasi, 2014.

Tabel 2. Jumlah Hotel Bintang dan Akomodasi Lainnya serta Jumlah Kamar menurut Klasifikasi di Jawa Barat Tahun 2011

Kabupaten/ Kota	Hotel Berbintang		Akomodasi Lainnya Menurut Jumlah Kamar					
			<10		10 - 25		25-40	
	Unit	Kamar	Unit	Kamar	Unit	Kamar	Unit	Kamar
1. Bogor	22	2.461	9	65	47	816	33	991
2. Sukabumi	7	345	24	135	54	888	15	436
3. Cianjur	13	1.386	60	354	49	736	23	695
4. Bandung	3	215	5	25	16	258	4	142
5. Garut	6	314	50	305	44	620	11	322

Sumber: Majalah Sertifikasi, 2014.

Alexander (2013) mengatakan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai surga liburan. Selama sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan disesaki 100.000 kamar dari 700 sampai 800 hotel baru. Sepanjang tahun 2012, Indonesia dikunjungi oleh delapan juta wisatawan asing dan jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Alexander (2013) juga mengatakan bahwa jumlah hotel baru tersebut menggenapi data yang dilansir Badan Pusat Statistik yang memperlihatkan bahwa sampai akhir 2012 terdapat lebih dari 1.600 hotel dengan penawaran kamar seba-nyak 156.000 unit, yang berarti meningkat 9 persen dibanding tahun 2011. Dengan demi-kian, hingga 2023 mendatang, Indonesia akan memiliki sebanyak 256.000 unit kamar dari total 2.400 hotel.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah hotel yang cukup tinggi adalah kota Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu gerbang turis mancanegara. Jumlah hotel yang ada di Kota Bogor pada tahun 2011 yang lalu mencapai 150 dengan jumlah kamar 6.395 dan jumlah tempat tidur sebanyak 12.087.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Agus Chandra, mengajak kerjasama antara pemerintah dan kalangan pengusaha untuk mempersiapkan implementasi MEA. Pada Konferensi Asia Afrika 2015, Agus mengusulkan agar Indonesia melakukan promosi pariwisata Indonesia, khususnya kota Bogor, untuk menarik pasar perhotelan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Arief Yahya, menyatakan, tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015. Untuk menyongsong MEA, sebanyak 375 ribu orang harus sudah memiliki sertifikasi. Faktanya, pada tahun 2014, ada 375 ribu tenaga kerja pariwisata dan yang punya sertifikasi baru 121 ribu orang, belum sampai setengah dari total tenaga kerja di bidang pariwisata dan perhotelan. Salah satu strategi Indonesia dalam mempersiapkan tenaga kerja di bidang pariwisata dan perhotelan untuk menghadapi MEA adalah bentuk pencapaian akselerasi antara pemerintah dengan LSP pariwisata pihak kesatu dan ketiga diwujudkan dalam bebe-

rapa program. Diantaranya adalah membuat komitmen bersama dengan industri untuk standar kompetensi yang sama yaitu *ASEAN Common Community Standards for Tourism Professional* (ACCSTP). ACCSTP ini sudah disepakati dan diakui dalam ASEAN MRA *on Tourism Professionals* bagi industri pariwisata bidang hotel, restoran dan perjalanan wisata (Ismainy, 2014).

Kegiatan pemerintah untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi ini adalah bentuk pemenuhan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Pasal 1 dikatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Sedangkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Pasal 52 dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Mari Pangestu selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa sertifikat kompetensi memberikan kebanggaan bagi yang memilikinya, karena membuat lebih percaya diri. Pada tataran dunia kerja, dengan memiliki sertifikat kompetensi maka daya tawar akan gaji/upah menjadi berimbang. Bagi pengusaha, memiliki pegawai yang bersertifikat adalah aset dalam persaingan bisnis. Solusi yang saling menguntungkan seperti ini dinilai sangat perlu ditumbuhkan.

KESIMPULAN

Implementasi MEA yang akan dilakukan pada akhir tahun 2015 nanti membawa kabar gembira sekaligus kabar buruk bagi Indonesia apabila tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kabar gembiranya adalah peluang untuk pertumbuhan ekonomi semakin terbuka lebar. Namun, apabila tidak siap, maka tenaga kerja Indonesia akan dapat dengan mudah tergeser oleh tenaga kerja dari

negara-negara tetangga yang lebih berkualitas dan lebih murah. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan beberapa strategi.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling awal dibuka untuk implementasi MEA di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara untuk berlibur dan diprediksi akan semakin ramai dikunjungi hingga pada tahun 2023 nanti. Implementasi MEA dapat berakibat buruk bagi tenaga kerja Indonesia khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan jika tidak melakukan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar nasional. BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) (2014) telah menyusun standar yang harus dipenuhi agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah untuk melakukan sertifikasi kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja di sektor pariwisata dan perhotelan yang ada di Indonesia. Kunci utama menghadapi MEA adalah peningkatan kompetensi SDM Indonesia agar bisa memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan meningkatkan daya saing SDM Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, H.B. 2013. **Properti: Indonesia Disesaki 2.400 Hotel Hingga 2023**. www.properti.kompas.com/read/2013/08/28/1743217/Indonesia.Disesaki.2.400.Hotel.Hingga.2023. Diakses tanggal 15 Mei 2015.
- ASEAN Secretariat. 1997. **ASEAN VISION 2020**. www.asean.org/news/item/asean-vision-2020. Diakses tanggal 04 Mei 2015.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. **Jawa Barat Dalam Angka**. Jakarta: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
- BNSP. 2014. **Majalah Sertifikasi**. Edisi Pertama. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Ismainy, V.E. 2014. **Ekonomi: MetroTV News**. www.ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/04/327723/tenaga-kerja-pariwisata-indonesia-belum-siap-hadapi-mea-2015. Diakses tanggal 15 Mei 2015.
- Khoer, M. 2015. **Sebelum MEA 2015, Pengusaha Hotel di Bogor Ingin Matangkan SDM**. www.industri.bisnis.com/read/20150421/12/425283/sebelum-mea-2015-pengusaha-hotel-di-bogor-ingin-matangkan-sdm. Diakses tanggal 26 April 2015.
- Rahayu, S. 2014. **Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**. www.seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html. Diakses tanggal 26 April 2015.
- Saragih, A.E. 2013. **Rubrik: Kompasiana**. www.kompasiana.com/arioneuodia/peluang-dan-tantangan-dalam-persaingan-mea-2015_552c4ab36ea834d04c8b4580. Diakses tanggal 14 Mei 2015.
- Suliswanto, M.S.W. 2013. Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan**. 2011. Bandung: Citra Umbara.